

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

# ERP hanya Berlaku di Kawasan Angkutan Umum

## Gambir, Warta Kota

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyebut, implementasi ERP wajib diutamakan diimplementasikan pada kawasan/koridor yang dilayani angkutan umum massal.

Bahkan layanan angkutan umum pada kawasan yang terdampak ERP wajib mampu memenuhi kebutuhan, baik secara kuantitas dan kualitas layanan sesuai dengan kebutuhan kawasan yang dilayani tersebut.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan pada MTI Djoko Setijowarno mengatakan, pemenuhan kebutuhan mobilitas masyarakat melalui angkutan umum sebagai opsi pengganti kendaraan pribadi di kawasan yang terdampak ERP, adalah hal yang tidak bisa dinegoisasikan.

Soalnya, kebijakan ini berdampak bagi penghuni kawasan maupun pengunjung kawasan yang terkena penerapan ERP.

"Kegagalan pembenahan dan pengembangan transportasi umum di kawasan/koridor ERP atau kawasan yang terdampak secara langsung adalah hal yang tidak dapat diterima secara konsep nalar dan keilmuan," kata Djoko berdasarkan keterangannya pada Minggu (29/1/2023).

"Kegagalan tersebut artinya adalah

kegagalan penempatan ERP sesuai fitrahnya sebagai bagian strategi besar yang menyeluruh," lanjutnya.

Menurut dia, secara ideal ERP sepatutnya diterapkan melingkupi sebuah kawasan dan bukan berupa koridor. Penerapan ERP secara koridor berpotensi melimpahkan beban lalu lintas ke koridor lain yang bersifat alternatif akses untuk asal dan tujuan pergerakan lalu lintas yang sama.

"Sejalan dengan konsekuensi logis penerapan ERP dengan konsep koridor yang berpotensi memindahkan beban lalu lintas ke koridor lain di DKI Jakarta, penerapan ERP harus melalui kombinasi dengan strategi manajemen kebutuhan transportasi lainnya," ungkapnya.

## ITCS

Dia mencontohkan seperti halnya kombinasi dengan ITCS (intelligent traffic control system) untuk koridor tanpa angkutan massal agar mampu mengurai beban lalu lintas yang terlimpahkan dari koridor ERP.

Bersamaan dengan itu, juga dilakukan implementasi ETLE di koridor luar ERP untuk memastikan kedisiplinan lalu lintas.

"Penerapan ERP berbasis koridor sepatutnya diposisikan sebagai bagian

langkah awal menuju penerapan berbasis kawasan untuk menghindari pelimpahan volume lalu lintas," ucapnya.

Apabila ERP direncanakan diterapkan dalam jangka pendek, disarankan membuat regulasi tersendiri bagi operasional kendaraan komersial dan logistik yang selama ini berada dan beroperasi dalam kawasan ERP, namun tidak menggunakan nomor plat umum karena penggunaan sendiri.

Hal ini dilakukan untuk mengurangi dampak sosial dan perekonomian pada kawasan ERP.

Sementara itu beragam upaya untuk melaksanakan program manajemen kebutuhan transportasi telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Salah satu yang sempat booming adalah kebijakan 3-in-1.

"Solusi yang diterapkan di Jalan Medan Merdeka Barat hingga Jalan Sisingamangaraja ini ternyata belum berhasil mengendalikan tingkat kemacetan, malah justru menimbulkan permasalahan sosial baru, yaitu kehadiran joki penumpang yang membuat kebijakan ini akhirnya dihapuskan melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2016," jelas Djoko. (faf)